

**ANALISIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DALAM
KONTRAK KERJASAMA DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK
(Studi Memorandum of Understanding antara Forisntinct dan Partner)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Disusun oleh :

AZALIA SEPTINA WARDANI
C100130157

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DALAM
KONTRAK KERJASAMA DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK**
(Studi Memorandum of Understanding antara Forisintinct dan Partner)

PUBLIKASI ILMIAH

Disusun oleh :
AZALIA SEPTINA WARDANI
C100130157

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh:

Pembimbing



(Septarina Budiwati, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DALAM
KONTRAK KERJASAMA DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK
(Studi Memorandum of Understanding antara Forisintinct dan Partner)**

Yang ditulis Oleh:

AZALIA SEPTINA WARDANI
C100130157

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada: Jumat, 4 Agustus 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Septarina Budiwati, S.H., M.H (

Sekretaris : Nuswardani, S.H., S.U (

Anggota : Darsono, S.H., M.H (

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azalia Septina Wardani

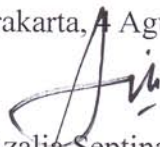
NIM : C100130157

Alamat : Winong RT4/RW2 Kragilan, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 4 Agustus 2017


Azalia Septina Wardani
C100130157

ANALISIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DALAM KONTRAKKERJASAMA DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK (STUDI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA FORISNTINCT DAN PARTNER)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *Memorandum of Understanding* dalam Kontrak Kerjasama dan akibat hukum pihak-pihak yang mengingkari *Memorandum of Understanding*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian pelaksanaan *Memorandum of Understanding* dalam kontrak kerjasama dan akibat hukum pihak-pihak yang mengingkari *Memorandum of Understanding* Forinstinc berpedoman pada Asas Kebebasan Berkontrak. Kesimpulan dari penelitian ini adanya kesesuaian antara pelaksanaan *Memorandum of Understanding* Forinstinc dengan Asas Kebebasan Berkontrak meskipun demikian *Memorandum of Understanding* tersebut tidak dapat mengikat para pihak karena tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.

Kata Kunci: *Memorandum of Understanding*, Kerjasama, Hukum Kontrak

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of *Memorandum of Understanding* in Cooperation Contract and the legal consequences of parties denying *Memorandum of Understanding*. The research method uses by the researcher is normative research. Type of research uses by the researcher is qualitative research. From the research results of the *Memorandum of Understanding* in cooperation contract and the legal consequences of the parties denying the *Memorandum of Understanding* Forinstinc is directed from the Principle of Freedom of Contract. The conclusion of this research is the conformity between the implementation of *Memorandum of Understanding* Forinstinc and Principle of Freedom of Contract although the *Memorandum of Understanding* can not bind the parties, because it is not accordance with Article 1320 of Civil Code.

Keywords: *Memorandum of Understanding*, Cooperation, Contract Law

1. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis di Indonesia sekarang ini sangat pesat, karena munculnya para pembisnis muda yang sangat inovatif dan kreatif di segala bidang. Apalagi bisnis di bidang pakaian, para pembisnis muda tersebut tidak ada habisnya membuat inovasi-inovasi baru agar kualitas produknya tidak kalah saing dengan produk non lokal. Para pembisnis tersebut biasanya melakukan sebuah kerjasama dengan beberapa pihak untuk mempromosikan produknya.

Perumusan suatu perjanjian atau kontrak sendiri biasanya diawali dengan negosiasi dari para pihak. Bagi pelaku bisnis modern, negosiasi merupakan bagian yang *inheren* dengan *ritme* dan kinerja mereka.¹ Setelah ada kesepakatan dan kesepahaman dalam negosiasi, kemudian para pihak akan mengadakan proses prakontraktual sebelum kontrak, salah satunya dengan pembuatan nota kesepahaman atau sering disebut dengan istilah “*Memorandum of Understanding*” (*MoU*). Dalam hukum Perjanjian di Indonesia, tidak diberikan ketentuan khusus yang mengatur tentang *MoU*. *MoU* dapat diberlakukan di Indonesia dengan berdasar pada Asas Kebebasan Berkontrak.

Sekarang ini para pembisnis lebih memilih membuat *MoU* untuk dijadikan dasar hukum dari kontrak kerjasamanya. Seperti yang dilakukan oleh Forinstinct (Distro) dan Partner. Mereka membuat *MoU* untuk dijadikan dasar kontrak kerjasama promosi produk, yang dibuat atas kesepakatan dan kesepahaman bersama. Namun permasalahannya sekarang apakah *MoU* yang di buat oleh kedua pihak sebagai kontrak kerjasama tersebut dapat dilaksanakan seperti Kontrak, mengingat bahwa *MoU* merupakan suatu Pra Kontrak atau nota kesepahaman.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana

¹ Muhammad Syaifuddin, 2012, *HUKUM KONTRAK Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, hal. 162

pelaksanaan *Memorandum of Understanding* dalam Kontrak Kerjasama ditinjau dari Hukum Kontrak? (2) Bagaimana akibat hukum bagi pihak-pihak yang mengingkari isi *Memorandum of Understanding* Forinstinct?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan *Memorandum of Understanding* dalam Kontrak Kerjasama ditinjau dari Hukum Kontrak. (2) Untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak-pihak yang mengingkari isi *Memorandum of Understanding* Forinstinct.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.² Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵ Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sukoharjo. Karena ketersediaan data dan pengambilan data lebih mudah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan *Memorandum of Understanding* dalam Kontrak Kerjasama Ditinjau dari Hukum Kontrak.

² Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, hal. 57

³ Lexy J.Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 9

⁴ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, hal. 57

⁵ Lexy J.Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 9

Berkaitan dengan usaha penjualan berbagai produk di Distro Forinstinc, Hendy Putra Adi Tama selaku Pemilik Distro (Owner Forinstinc) sepakat melakukan kerjasama dengan Ghufon Prasetyo selaku Fotografer yang berkecimpung dalam dunia fotografi yaitu menjadi fotografer pemotretan model. Kerjasama dilakukan guna kepentingan photo artis dan promosi (promote) Brand Forinstinc, Kerjasama Hendy dan Ghufon dibuat dalam suatu Kontrak Kerjasama berbentuk *Memorandum of Understanding*.

Sudikno Mertokusumo mengartikan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.⁶ Kesepakatan berkaitan erat dengan Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.⁷

Asas tersebut dapat dicermati dari adanya pernyataan kata “sepakat “ kedua pihak dalam kontrak, dengan membuat ketentuan atau janji yang akan dilaksanakan.⁸ Dalam *Memorandum of Understanding* Forinstinc, kata sepakat ditunjukan pada kalimat: “Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama photo artist dan promote Brand dengan ketentuan sebagai berikut...”. Serta bukti kesepakatan tersebut ditunjukkan dengan tanda tangan kedua belah pihak. Namun dalam *Memorandum of Understanding* tersebut tidak mencantumkan tanda tangan kedua pihak.

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum,

⁶Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hal.112

⁷Salim H.S,2014, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 10

⁸ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal.79

sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.⁹ Orang yang cakap adalah orang yang sudah dewasa, yang telah berumur 21 Tahun atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- 1.) Anak dibawah umur
- 2.) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan¹⁰

Hendy Putra Adi Tama, Pemilik Distro Forinstinc (Owner Forinstinc), sebagai pihak I. Ghufon Prasetyo, Photografer sebagai pihak II. Perjanjian yang dilakukan pihak I dan pihak II adalah perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian ini ketentuan kecakapan melekat pada pihak I karena pada saat ini telah berumur 24 (duapuluh empat) Tahun dan sudah mempunyai identitas diri atau KTP. Akan tetapi pihak II pada saat ini masih berumur 20 (duapuluh) Tahun namun demikian ia sudah menjadi photografer dan sudah mempunyai identitas diri atau KTP, jika seperti itu kecakapan melekat pada pihak II.¹¹

Selanjutnya KUH Perdata menegaskan bahwa objek atau pokok persoalan tidak perlu ditentukan secara individual, cukup ditentukan jenisnya (vide Pasal 1333 ayat (1)).¹²

Objek yang terdapat dalam *Memorandum of Understanding* Forinstinc adalah Brand (Produk) Forinstinc. Jenis Brand (Produk) yang dijual di Distro Forinstinc yaitu ada kaos, jacket, kemeja (flanel), topi, tas dan produk lainnya.¹³ Tugas pihak kedua yaitu Ghufon, Photografer adalah mempromosikan brand tersebut melalui foto artis yang diambil olehnya. Berkaitan dengan hal tersebut, objek yang terdapat dalam *Memorandum of Understanding* Forisntinc telah memenuhi persyaratan sebagai objek hukum

⁹Salim H.S, *Op.Cit.*, hal. 33

¹⁰*Ibid*, hal. 34

¹¹ Hendy Putra Adi Tama, Pemilik Distro Forinstinc “*Wawancara Pribadi*”, Pada Selasa 2 Mei 2017 Pukul 13.00 WIB di Distro Forinstinc, Sukoharjo

¹² Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 129

¹³ Hendy Putra Adi Tama, Pemilik Distro Forinstinc “*Wawancara Pribadi*”, Pada Selasa 2 Mei 2017 Pukul 13.00 WIB di Distro Forinstinc, Sukoharjo

yang terdapat dalam doktrin hukum kontrak dan juga sesuai pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Vollmar memberikan pengertian sebab atau causa yang tidak dilarang sebagai maksud atau tujuan dari kontrak.¹⁴

Sesuai dengan pendapat Vollmar bahwa maksud dibuatnya *Memorandum of Understanding* Forinstinc yaitu untuk melakukan kerjasama berupa promosi (promote) brand (produk) Forinstinc dan photo artis. Hendy selaku pemilik distro Forinstinc menginginkan Brand dari Distronya dipromosikan oleh Ghufon dan ia juga harus menyerahkan foto artis yang diambil olehnya kepada Hendy. Timbal baliknya, Ghufon mendapatkan pembayaran atas jasa fotografernya serta menghendaki agar jasa fotografernya dipromosikan oleh Hendy.¹⁵

Dalam pembuatan *MoU* Forinstinc, Hendy selaku pihak I dan Ghufon selaku pihak II sepakat untuk membuat *MoU* tersebut guna kepentingan kerjasama bisnis. *MoU* Forinstinc dibuat hanya oleh pihak I dan pihak II tanpa perantara pejabat yang berwenang dan dibuat dalam bentuk tertulis. Namun *MoU* tersebut tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan alasan pihak I dan pihak II tidak dalam satu wilayah/daerah yang sama, jarak antara keduanya juga sangat jauh sehingga sulit untuk bertemu. Hendy di Sukoharjo sedangkan Ghufon di Bandung. *MoU* Forinstinc tersebut hanya atas dasar kesepakatan, persetujuan dan rasa saling percaya antar kedua pihak.¹⁶

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal 129

¹⁵ Hendy Putra Adi Tama, Pemilik Distro Forinstinc “*Wawancara Pribadi*” Pada Selasa 2 Mei 2017 Pukul 13.00 WIB di Distro Forinstinc, Sukoharjo

¹⁶ Hendy Putra Adi Tama, Pemilik Distro Forinstinc “*Wawancara Pribadi*” Pada Selasa 2 Mei 2017 Pukul 13.00 WIB di Distro Forinstinc, Sukoharjo

Pembuatan *Memorandum of Understanding* Forinstinc diserahkan kepada Hendy selaku pihak I. *Memorandum of Understanding* dibuat 3 halaman. Isi dari *MoU* yaitu hak dan kewajiban para pihak yang menjadi pokok dalam kontrak kerjasama. Apabila ada hal lain yang belum diatur dalam *MoU* tersebut akan dimusyawarahkan antar kedua pihak. Jangka waktunya berlakunya adalah 1 bulan.¹⁷

Memang bentuk dan isi *MoU* Forinstinc sedikit berbeda dengan bentuk atau isi yang telah dicontohkan dalam literatur. Karena pada dasarnya *MoU* tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang bentuk dan isinya, melainkan didasarkan atas Asas Kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk menentukan isi, pelaksanaan, persyaratan, dan bentuk kontrak yang dibuat baik tertulis atau lisan.

3.2 Akibat Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang Mengingkari Isi *Memorandum of Understanding* Forinstinc

Perlu diketahui, jika terdapat pihak yang melakukan pengingkaran terhadap *Memorandum of Understanding* maka dapat dilihat terlebih dahulu dalam klausula *MoU* nya seperti apa dan bagaimana, apakah terdapat pengaturan mengenai cara penyelesaiannya sengketa atau tidak, atau dimungkinkan juga pihak yang lainnya dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi.

Wanprestasi menurut Munir Fuady, adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, yang

¹⁷ Hendy Putra Adi Tama, Pemilik Distro Forinstinc “*Wawancara Pribadi*”, Pada Rabu 10 Mei 2017 Pukul 16.00 WIB di Distro Forinstinc, Sukoharjo

merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak.¹⁸

Seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap prestasi yang telah disepakati oleh para pihak didalam suatu kontrak yaitu bila tidak melakukan hak dan kewajiban dengan baik sesuai prestasinya, itulah yang dinamakan wanprestasi. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap *Memorandum of Understanding*, maka pihak tersebut dapat dituntut untuk menggantikan kerugian yang telah ditimbulkannya. Ganti rugi yang dimaksud adalah biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita dan keuntungan yang mungkin akan diperoleh. Sanksi yang diperoleh hanya sebatas sanksi moral, karena *MoU* tidak memiliki sanksi yang bersifat memaksa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang pada intinya akibat hukum jika melakukan wanprestasi salah satunya adalah pihak yang wanprestasi harus menerima pemutusan kontrak dan serta membayar sejumlah ganti rugi, tapi dalam *Memorandum of Understanding* Forinstinc tidak mencantumkan jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan jika pihak II melakukan pelanggaran, dengan alasan ganti kerugian akan dinegosiasikan pihak I dan pihak II dikemudian hari apabila ada yang melanggar, supaya sesuai dengan prestasi yang telah dilanggar.¹⁹

Apabila negosiasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, akan melayangkan gugatan ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.²⁰ Sesuai dengan Ketentuan Pasal 1267 jis Pasal 1266 KUH Perdata, telah

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal.338

¹⁹ Hendy Putra Adi Tama, Pemilik Distro Forinstinc “*Wawancara Pribadi*” Pada Selasa 2 Mei 2017 Pukul 13.00 WIB di Distro Forinstinc, Sukoharjo

²⁰ Hendy Putra Adi Tama, Pemilik Distro Forinstinc “*Wawancara Pribadi*” Pada Selasa 2 Mei 2017 Pukul 13.00 WIB di Distro Forinstinc, Sukoharjo

menjelaskan bahwa pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dapat memilih mengajukan tuntutan haknya di pengadilan berupa:

- a) Pelaksanaan kontrak
- b) Pelaksanaan kontrak disertai ganti kerugian
- c) Ganti kerugian saja
- d) Pemutusan kontrak
- e) Pemutusan kontrak disertai dengan ganti kerugian

Dalam hal pengajuan tuntutan ke pengadilan karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak II maka Hendy selaku pihak I dapat mengajukan tuntutan kepada Ghufon selaku pihak II dapat berupa hal yang tercantum di Pasal 1267 jis Pasal 1266 KUH Perdata yang telah diuraikan di atas ke Pengadilan Negeri Sukoharjo.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

(1) Bahwa pelaksanaan *Memorandum of Understanding* Forinstinc dalam kontrak kerjasama ditinjau dari hukum kontrak yaitu Hendy selaku pihak I dan Ghufon selaku pihak II sepakat untuk membuat *Memorandum of Understanding* yang berisi kesepakatan untuk photo artis serta promosi (promote) Brand Forinstinc guna kepentingan bisnisnya. *Memorandum of Understanding* Forinstinc dibuat hanya oleh pihak I dan pihak II tanpa perantara pejabat yang berwenang dan dibuat dalam bentuk tertulis. Namun *Memorandum of Understanding* tersebut tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan alasan pihak I dan pihak II tidak dalam satu wilayah/daerah yang sama, jarak antara keduanya juga sangat jauh sehingga sulit untuk bertemu. *Memorandum of Understanding* yang dilakukan pihak I dan pihak II didasarkan pada Asas Kebebasan Berkontrak yang dibuat secara tertulis. (2) Bahwa akibat hukum apabila pihak-pihak mengingkari isi

Memorandum of Understanding Forisntinc yaitu dengan melihat terlebih dahulu dalam klausula *Memorandum of Understanding* nya seperti apa dan bagaimana, apakah terdapat pengaturan mengenai cara penyelesaian sengketanya atau tidak, atau dimungkinkan juga pihak yang lainnya dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi. *Memorandum of Understanding* yang dibuat kedua pihak memang tidak memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, karena tidak terdapat tanda tangan kedua pihak. Meskipun demikian para pihak menganggap bahwa *Memorandum of Understanding* yang telah dibuat tetap bersifat mengikat serta tidak ada pihak yang ingin membatalkannya. Jika terjadi wanpretasi atau salah satu pihak merugikan pihak lain, maka akan diselesaikan melalui gugatan wanprestasi ke pengadilan yaitu ke Pengadilan Negeri Sukoharjo sesuai Pasal 1267 jis Pasal 1266 KUH Perdata, didahului dengan negosiasi. Hal ini telah disepakati mereka sebelum dan saat membuat *Memorandum of Understanding*.

4.2 Saran

(1) *Memorandum of Understanding* tersebut seharusnya ditandatangani dan diberi materai agar sah serta dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua pihak yang membuat. (2) *Memorandum of Understanding* Forimstimc telah disetujui kedua pihak dan tidak ada yang keberatan sehingga tidak ada yang berkeinginan untuk membatalkan, maka dalam hal adanya wanprestasi atau hal yang merugikan pihak seharusnya dalam *Memorandum of Understanding* dicantumkan Pengadilan mana yang berhak memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara wanprestasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing
- Meleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- S Salim H, 2014, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syaifuddin, Muhammad , 2012, *HUKUM KONTRAK Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata